

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia khususnya saat pasca pandemi covid-19. Selama hampir dua tahun terakhir pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi perekonomian dunia melemah dan memicu resesi ekonomi global. Dampak pandemi covid-19 terasa di segala sektor terutama di sektor ekonomi yang terasa sampai ke unit pemerintahan terkecil yaitu desa. Oleh karena itu lembaga keuangan memiliki peran penting untuk memastikan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil selama pandemi covid-19. Peran strategis lembaga keuangan sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien, kepada masyarakat dimasa pandemi sangat dibutuhkan. Terutama oleh masyarakat pedesaan. (Wiwoho, 2014)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkembang pesat di Bali merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan desa dan *krama desa*. LPD pertama kali digagas oleh Mantan Gubernur Bali Ida Bagus Mantra yang tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi masyarakat *desa adat*. Hal ini sejalan dengan

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, “Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada *krama desa pakraman*”. Dibentuknya LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, penyaluran modal yang efektif, dapat memberantas sistem ijon dan gadai gelap yang sering terjadi di masyarakat pedesaan dan menciptakan daya beli masyarakat, serta dapat melancarkan arus lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Penyaluran dana kepada usaha-usaha produktif di daerah pedesaan, tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan regional daerah Bali pada umumnya (Widhi Asih dan Anantawikrama, 2022)

Pengelolaan lembaga keuangan bukanlah hal yang mudah, pelaporan keuangan yang tepat waktu menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh LPD kepada pihak yang bersangkutan untuk mengambil keputusan, seperti LP-LPD, *Bendasa Adat*, dan *Krama desa adat* Dalam *paruman desa*. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. Oleh karena itu laporan keuangan yang bermutu harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang telah di tentukan oleh IAI, salah satunya relevansi. Informasi dalam laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila memiliki ketepatanwaktuan(Standar Akuntansi Keuangan, 2007)

Ketepatanwaktuan dapat di definisikan sebagai tersajinya laporan bagi para pengambil keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatannya untuk mempengaruhi suatu keputusan. Gregory dan V. Horn (2012), menyatakan bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan. Informasi yang baik dilihat dari segi waktunya. Laporan keuangan disampaikan tepat waktu artinya informasi keuangan tersebut masih bersifat baru dan tidak *out of date* dan informasi tersebut harus tersedia bagi pengambil keputusan ketika dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakainya. Dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau meramalkan masa depan, serta mengoreksi atas hasil evaluasi dimasa lalu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Relevansi laporan keuangan ini juga berlaku untuk Lembaga Perkreditan Desa, seperti yang termuat dalam Peraturan Gubernur Bali No. 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 BAB X pasal 17 dan 18 tentang Pelaporan. "*Prajuru* LPD memiliki kewajiban menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada *Bendesa* dan LP-LPD setiap; 1 bulan, 3 bulan dan tahunan. *Prajuru* LPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun buku LPD berakhir dalam *paruman desa*".

Namun kenyataanya Sebagai lembaga keuangan mikro yang telah berkembang pesat di Bali, yang dilihat dari jumlah Lembaga Pengkreditan Desa di Bali yaitu 1436 LPD, masih banyak terjadi permasalahan mengenai penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu pada Lembaga Perkreditan Desa. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah LPD terbanyak yaitu 159 LPD, Namun perkembangan LPD ada dalam kondisi yang kurang baik yang disebabkan terjadinya penurunan kesehatan LPD di Kabupaten Bangli.

1.1 Data kesehatan LPD di Kabupaten Bangli 2020-2021

tahun	Kategori					Total LPD
	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Sakit	macet	
2020	103	29	15	4	8	159
2021	91	39	21	7	6	159

Sumber: LP-LPD Kabupaten Bangli

Berdasarkan data kesehatan LPD di kabupaten bangli terjadi penurunan kesehatan LPD yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena menurunnya kinerja LPD yang didukung oleh penelitian Agus dan Susila (2016) yang berjudul Pengukuran Kinerja Pengkreditan Desa (LPD) Kecamatan Susut dengan Analisis Balanced Scorecard. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja LPD Kecamatan Susut Kabupaten Bangli masuk kategori cukup baik dengan score 2089,13. Dan perlu ditingkatkan agar mendapat kategori sangat baik. Yulianingsih Ayu (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak semua karyawan Lembaga Perkreditan Desa di Tembuku dipilih berdasarkan kemampuannya, masih sering didasarkan atas faktor kedekatan dengan kepala LPD, selain itu pemilihan kadang dilakukan oleh

masyarakat *adat* setempat melalui musyawarah yang tidak melihat latar belakang pendidikan atau pengalaman dari karyawan yang mengakibatkan sering terjadinya proses penyusunan laporan keuangan yang terhambat. Murti (2018) juga menjelaskan bahwa Kepala LPD Kabupaten Bangli Perlu Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal pada bagian Pengawasan dan Aturan untuk meningkatkan kinerja operasional LPD.

Terjadinya penurunan kesehatan dan kinerja LPD yang masih belum maksimal menyebabkan penyusunan laporan keuangan terhambat yang mengakibatkan terlambatnya penyampaian laporan keuangan kepada LP-LPD Kabupaten Bangli. pada tahun 2020 tidak terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan namun di tahun 2021 ada 6 LPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya dengan data sebagai berikut:

1.2 Data LPD yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan 2021 di Kabupaten Bangli

Kematan	Jumlah LPD	Jumlah LPD yang Terlambat menyampaikan Laporan Keuangan	
		2020	2021
Kintamani	61	-	4
Susut	39	-	1
Tembuku	36	-	1
Bangli	23	-	-
Total	159	0	6

Sumber: LP-LPD Kabupaten Bangli

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga terjadi setiap bulanya, LPD harus melaporkan laporan keuangan bulanannya kepada LP-LPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan Wakil Koordinator LP-LPD Kabupaten Bangli yaitu I Gusti Nyoman Rijasa, menyatakan bahwa “selama awal tahun buku 2022 30% dari 159 LPD yang ada di Kabupaten Bangli terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan bulanan. dari 30% LPD yang terlambat melaporkan keuangan bulanannya yakni, 15% merupakan LPD yang ada di Kecamatan Kintamani, 6% untuk Kecamatan Susut, 5% untuk Tembuku dan 4% untuk kecamatan Bangli”.

Bapak Gusti Ngurah Sandinata S.E selaku Ketua LP-LPD Kabupaten Bangli, juga menjelaskan bahwa :“hal tersebut terjadi karena beberapa hal yaitu; situasi dan kondisi di desa adat seperti adanya upacara besar atau ‘*Piodalan*’ banyaknya LPD yang belum menggunakan sistem IT berupa *core banking*, sehingga banyak LPD yang terlambat dalam melakukan pelaporan karena masih menggunakan sistem manual, pengendalian internal yang lemah terhadap manajemen dimana tata kelola dan tata letak manajemen atau pengelola yang masih belum sesuai dengan kebutuhan LPD, serta sumber daya manusia yang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya”.

Melihat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bangli yaitu penurunan kesehatan LPD yang menyebabkan kinerja LPD tidak maksimal sehingga memicu terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada LP-LPD di Kabupaten Bangli. berpedoman pada tabel 1.2 keterlambatan paling banyak terjadi

di Kecamatan Kintamani maka dari itu peneliti menetapkan Kecamatan kintamani sebagai Lokasi penelitian. Dari permasalahan yang ada, kemungkinan tidak dilakukannya pelaporan keuangan LPD secara tepat waktu diduga karena beberapa faktor. Faktor pertama yang mempegaruhi tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan ialah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. SDM bisa diartikan sebagai keuletan dan kemampuan manusia itu sendiri yang dapat dilihat dari tingkat pendidikannya, pelatihan yang di jalankan, serta pengalaman kerja yang pernah dijalankannya Andrianto Elvin (2017) Aset didalam suatu organisasi yang sangat penting dan harus dipertahankan oleh manajemen ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat juga menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, ini disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu Sapitri (2015).

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia di LPD yang dilihat dari pengetahuan, pengalaman, pendidikan, keahlian dan kemahiran dalam menjalankan tugas masih kurang maksimal. Hasil Wawancara dan data yang diperoleh dari LP-LPD di Kabupaten Bangli rata-rata karyawan atau pegawai LPD di Kabupaten Bangli merupakan Lulusan SMA kebawah, meskipun ada beberapa Sarjana namun tidak

Sarjana Ekonomi khususnya Akuntansi. Kurangnya kemampuan dalam bidang akuntansi ini dapat memperlambat pembuatan laporan keuangan. Sehingga masih perlu dilakukan pelatihan atau pembinaan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai atau karyawan LPD.

Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Satwika (2021) yang menunjukkan bahwa semakin memadai kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya ketepatan pelaporan keuangan pada KSU. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Intan Prunama (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pelaporan keuangan pada koperasi di Kabupaten Buleleng. Peneliti juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Andrianto Elvin (2017) menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Faktor kedua adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang lemah akan menyebabkan beberapa hal, salah satunya adalah ketidakandalan laporan keuangan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Satwika (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. agar tersedianya informasi yang relevan dan terpercaya dalam pengambilan keputusan diperlukan pencatatan yang akurat. Berkaitan dengan pencatatan keuangan, sistem akuntansi yang baik memiliki pengendalian internal yang baik pula. Sistem pengendalian internal ini diharapkan

mampu mencegah terjadinya kesalahan proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari ancaman sabotase sistem yang dilakukan oleh pelaku internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di beberapa LPD di Kecamatan Kintamani ternyata masih banyak LPD yang sistem pengendaliannya masih lemah. Hal ini dikarenakan pengawasan internal yang seharusnya mengawasi kinerja pengurus yang tidak maksimal. Contohnya pengawas tidak hadir saat melakukan tugasnya dilapangan dan kantor. Hasil wawancara dengan Bapak Gusti Ngurah Sandinata, S.E mengatakan bahwa masih banyak LPD yang belum melakukan pengawasan internal manajemen yang baik di beberapa LPD sehingga menyebabkan pembuatan laporan keuangan terdunda karena internal LPD tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu.

Hubungan sistem pengendalian internal dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan LPD di Kecamatan Kintamani yaitu mengacu pada penelitian Satwika (2021) bahwa semakin memadai sistem pengendalian internal yang dimiliki akan berdampak pada meningkatnya ketepatan pelaporan keuangan pada KSU di Kabupaten Bangli. penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Intan Prunama (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Koperasi di Kabupaten Buleleng. Peneliti mengacu juga pada penelitian Arsani (2017) hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, berpengaruh signifikan terhadap

ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan LPD di Kecamatan Banjar, Seririt, Busungbiu dan Gerokgak..

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Hermayanthi (2017). Teknologi informasi digunakan untuk menyajikan sebuah laporan serta berguna bagi perusahaan untuk bisa dengan mudah menyelesaikan tugasnya. Salah satu manfaat utama dari penggunaan teknologi informasi dalam organisasi adalah pekerjaan yang dilakukan lebih cepat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji dalam rangka perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen sehingga menunjang pelaporan yang lebih cepat. Isnayanti (2021) Kehadiran teknologi informasi juga memberikan banyak manfaat, dimana pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja LPD. Arsani (2017)

Pemanfaatan teknologi informasi dipilih menjadi salah satu variabel dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan LPD di Kecamatan Kintamani dilihat dari manfaat utama yang diberikan yaitu pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih cepat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala LP-LPD Kabupaten Bangli menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi masih kurang atau minim terutama LPD yang terletak di pelosok desa karena terhalangnya sambungan internet dan sedikitnya fasilitas IT seperti komputer, dan jaringan internet. Sehingga LPD tersebut masih menggunakan cara manual dan tidak bisa beralih menggunakan *core banking*.

Sehingga dapat dilihat kendala dari LPD pada pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan kondisi perangkat keras maupun perangkat lunak, kondisi sumber daya manusia yang ada dan dana untuk memiliki fasilitas tersebut.

Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan mengacu pada riset Satwika (2021) bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya ketepatan pelaporan keuangan di KSU Kabupaten Bangli. peneliti juga mengacu pada riset oleh Andrianto Elvin (2017) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Arsani (2017) yang menunjukkan bahwa hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada LPD di Kecamatan Banjar, Seririt, Busungbiu dan Gerokgak

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi ketepatwaktuan laporan keuangan adalah Pemahaman Akuntansi. Pemahaman Akuntansi dapat diterangkan sebagai proses kesiapan melakukan tugas, pengetahuan dibidangnya, dan pemahaman Hamdani dan Zuhrotun Aulia (2018). Dengan pemahaman Akuntansi yang baik maka akan memberikan keyakinan bagi pertumbuhan LPD. Pemahaman sebagai gerakan untuk mengimplementasikan informasi yang ada persepsi pengurus dalam menyusun laporan harus berdasarkan SAK yang berlaku dan benar memahami dengan baik.

Dengan begitu akan mempercepat proses pelaporan (Hamdani dan Zuhrotun Aulia 2018).

Dilihatnya variabel pemahaman akuntansi dalam ketepatan pelaporan keuangan LPD di Kecamatan Kintamani yaitu dilihat dari pentingnya informasi yang ada dalam laporan keuangan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Para pengurus dan pegawai LPD di harapkan mampu menerapkan standar akuntansi yang diterapkan dalam LPD dengan mengetahui macam-macam akun, penjurnalan, dan pembuatan neraca serta laporan laba rugi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kelapa LPD Batur Kecamatan Kintamani yaitu Bapak I Made Bilastra menyatakan bahwa pemahaman akuntansi bagi pegawai dan pengurus LPD sangat penting dan perlu dibina, apalagi kebanyakan pegawai memiliki latar belakang profesi diluar akuntansi. Sehingga laporan yang dibuat memiliki kualitas yang baik.

Hubungan pemahaman Akuntansi dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan merujuk kepada beberapa riset yaitu penelitian yang dilakukan oleh Melati Rima (2019) bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketepatan pelaporan keuangan UMK. Jadi semakin tinggi pemahaman akuntansi yang dimiliki maka semakin memudahkan pelaku dalam pembuatan laporan keuangan. Peneliti juga merujuk pada beberapa riset yang dilakukan oleh Hamdani dan Zuhrotun Aulia (2018) menunjukkan pemahaman laporan keuangan pengurus koperasi berpengaruh positif terhadap tingkat ketepatwaktuan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. serta Riset Dewi (2018) menjelaskan pemahaman

akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan telah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah Satwika (2021) dengan judul “Determinan Ketepatan Pelaporan Keuangan pada Koperasi Serba Usaha di Kabupaten Bangli” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan pelaporan keuangan koperasi serba usaha di kabupaten Bangli. selain itu penelitian ini mengacu juga pada penelitian yang dilakukan oleh Isnayanti (2021) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Laporan Keuangan Pengurus Koperasi , Kapasitas Sumber Daya Manusia, Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan” (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman laporan keuangan pengurus koperasi, kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan. Peneliti mengacu juga pada penelitian Arsani (2017) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Tingkat Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Keuangan LPD di Kecamatan Banjar, Seririt, Busungbiu dan Gerokgak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat profitabilitas berpengaruh signifikan

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan LPD di Kecamatan Banjar, Seririt, Busungbiu dan Gerokgak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2015) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas SDM dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Karangasem). Hasilnya menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas SDM dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil tidak konsisten tersebut dikarenakan perbedaan lokasi penelitian, variabel dan responden yang digunakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, populasi penelitian dan sampel penelitian yang digunakan. Objek dalam penelitian ini dilakukan pada LPD di Kecamatan Kintamani. Penelitian mengenai ketepatan pelaporan keuangan LPD belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu LPD di Kecamatan Kintamani tergolong LPD terbanyak yang terlambat melakukan pelaporan keuangan di Kabupaten Bangli. Penulis ingin dengan adanya penelitian ini bisa menjadi pengingat bagi LPD khususnya di Kecamatan Kintamani untuk melakukan pelaporan keuangan dengan tepat waktu.

Berdasarkan permasalahan yang ada, banyak LPD yang tidak melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal,**

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD di Kecamatan Kintamani”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan kesehatan LPD di Kabupaten Bangli yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan kepada LP-LPD Kabupaten Bangli.
2. Banyak LPD di Kecamatan Kintamani yang tidak melaporkan laporan keuangan bulanan dan tahunan secara tepat waktu, hal ini dipicu karena, kompetensi sumber daya manusia yang kurang dan pengendalian internal yang lemah dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum mumpuni.
3. Sebagian besar karyawan dan pengurus LPD di kabupaten Bangli utamanya di Kintamani merupakan lulusan SMA/SMK yang mengakibatkan Lemahnya Kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Sebagian besar LPD belum menerapkan core banking system yang merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi informasi terutama LPD yang letaknya di pelosok desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian dengan hanya berfokus dan berkaitan dengan Ketepatan

Waktu Pelaporan Keuangan (Y) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2), Pemahaman Teknologi Informasi (X_3), dan Pemahaman Akuntansi (X_4). Lokasi atau tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yaitu pada LPD di Kecamatan Kintamani.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD?
4. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD.

2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan baik itu dari segi pengembangan ilmu penelitian dalam hal mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Laporan Keuangan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan di LPD Kecamatan Kintamani.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, selain itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pemahaman

Laporan Keuangan Terhadap Waktu Ketepatan Pelaporan Keuangan LPD di Kecamatan Kintamani.

1.6.2.2 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan mampu memberikan sumber referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Laporan Keuangan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan LPD.

1.6.2.3 Bagi Lembaga Pengkreditan Desa se-Kecamatan Kintamani

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan khususnya mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan LPD dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan demi kemajuan LPD. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna mengembangkan LPD agar nantinya LPD mampu menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada *Prajuru, Panureksa*, dan *Bendasa Adat* dalam *Paruman Desa adat*. Serta menyampaikan laporan keuangan kepada LPLPD di Kabupaten Bangli.